

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Malayu Hasibuan (2009:1) manajemen pada dasarnya berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur yaitu : *men, money, methods, materials, machines* dan *market*.

Manajemen menurut Parker dalam Husaini Usman (2013:6) adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (*the art of getting things done through people*). Sarpre dalam Husaini Usman, manajemen adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan langsung untuk penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan Stephen P. Robbins dan Marry Coulter (2007:8) mengemukakan bahwa manajemen adalah proses mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.

Selanjutnya Malayu Hasibuan (2009:21), manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan. Mondy dalam Marwansyah (2014:3), manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Schuler dalam Edy Sutrisno (2011:6), manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi dan masyarakat.

Sementara itu, Anwar Prabu Mangkunegara (2007:2) menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu yang mengatur sebuah pemanfaatan sumber daya manusia yang dikelola secara profesional guna mencapai tujuan individu maupun organisasi secara terprogram dan terpadu guna menghasilkan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas serta mempunyai etos kerja dan loyalitas yang tinggi.

2.2 Kebijakan Publik

Berbagai batasan mengenai kebijakan publik diberikan oleh para ahli, meskipun tidak menyebutkan secara spesifik siapa pelaku kebijakan publik, kebijakan publik sering diberi batasan sebagai hasil-hasil keputusan (desicion) yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan publik. Istilah kebijakan biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, wewenang atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum.

Menurut Chandler dan Plano dalam Harbani Pasolong (2008:38), kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Sedangkan Edwards dan Ora Sharkansky dalam Irfan Islamy (2003:18) mengemukakan bahwa kebijaksanaan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Definisi lain dikemukakan oleh Pressman dan Widavsky dalam Budi Winarno (2002:17), kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robbert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik kebijakan publik, yaitu :

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karenan maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Woll dalam Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat atau memaksa.

2.3 Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. James Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010:24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut :

- a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural.

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

- b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan, atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

- c. Kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*). Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

2.4 Pengertian Pengawasan

Menurut S.P Siagian (2003: 258), pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan Nurahmi Hayani (2014: 98) mendefenisikan controlling atau pengawasan dan pengendalian adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sementara itu, Irham Fahmi menjelaskan (2014 : 96), pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.

George R. Terry dalam buku Irham Fahmi (2014 : 97), mengemukakan hal sebagai berikut : pengawasan didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Selain itu Leslie W. Rue (2010 : 9), mendefinisikan controlling adalah mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu. Sedangkan Manullang (2012 : 173), menjelaskan pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Definisi lain dikemukakan oleh Kadarisman (2013 : 173) pengawasan merupakan suatu proses yang tidak terputus untuk menjaga agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut Yahya (2006 : 133) Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Mc.Farland dalam buku Simbolon (2004 : 61) pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Menurut T. Hani Handoko (2003 : 25), mengatakan bahwa pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa pengawasan sangat penting didalam organisasi. Dengan demikian, pengawasan berkaitan erat dengan fungsi manajemen lainnya, terutama dengan perencanaan. Pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa kegiatan dan perencanaan, begitu pula rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Selanjutnya fungsi pengorganisasian dan pergerakan sebagai unsur manajemen, maka pengawasan berusaha meluruskan dan mengkoreksi segala aktivitas-aktivitas dilapangan supaya benar-benar mengarah pada usaha tercapainya tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah suatu usaha pimpinan yang menginginkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan mestinya atau tidak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.1 Fungsi Pengawasan

Menurut Simbolon (2004 : 62), fungsi pengawasan yaitu :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Selanjutnya T. Hani Handoko (2003 : 26), fungsi pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Penetapan standar pelaksanaan.
2. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

Menurut S.P Siagian (2003 : 259), pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai dengan rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi mungkin. Sama hal nya dengan pendapat Relawati (2012 : 107) tujuan atau fungsi dari pengawasan adalah untuk menghindari sedini

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mungkin terjadinya penyimpangan, akan tetapi apabila penyimpangan tersebut sudah terlanjur terjadi maka peran fungsi pengawasan adalah mengembalikan arah kegiatan pada tujuan yang sudah ditetapkan semula.

2.4.2 Prinsip-prinsip pengawasan

Relawati (2012 : 110) mengatakan prinsip-prinsip pengawasan adalah :

1. Dapat merefleksikan sikap-sikap dan kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi.
2. Dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan.
3. Bersifat fleksibel.
4. Dapat merefleksi pola organisasi.
5. Ekonomis.
6. Dapat dimengerti.
7. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Sedangkan menurut Simbolon (2004 : 69), prinsip-prinsip pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.
2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku.
4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
6. Pengawasan harus bersifat terus-menerus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (*feed back*) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang.

2.4.3 Jenis - jenis pengawasan

Senada dengan pendapat Situmorang dan Juhir dalam Siagian (2008 : 139), mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni :

1. Pengawasan langsung (*Direct Control*), ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seseorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar, seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan yang bersifat tidak langsung.
2. Pengawasan tidak langsung (*Indirect Control*) ialah pengawasan jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk : (a) tertulis, (b) lisan.

Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa seringnya para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

2.4.4 Proses Pengawasan

Menurut Yahya (2006 : 136) proses pengawasan terdiri dari 5 tahap :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan).
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan.
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan.
5. Pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan.

Silalahi (2009:176) mengemukakan bahwa proses-proses pengawasan mengandung langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan objek-objek yang akan diawasi.
2. Menetapkan sebagai alat ukur pengawasan atau yang menggambarkan pekerjaan yang di kehendaki.
3. Menentukan prosedur, waktu, dan teknik yang di gunakan.
4. Mengukur hasil kerja yang di laksanakan.
5. Membandingkan antara hasil kerja dengan standar untuk mengetahui apakah ada perbedaan.
6. Melakukan tindakan-tindakan perbaikan.

2.4.5 Pengawasan yang Efektif

Menurut Sarwoto (2010 : 28), pengawasan yang efektif yaitu :

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid.
2. Tepat waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan.
3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.
5. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat.
6. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya.
8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi.
9. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukkan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil
10. Diterima para anggota organisasi , maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggung jawab dan prestasi.

2.5 Perizinan

2.5.1 Pengertian Perizinan

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan izin untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau usaha (Nanang Nurdin,2012:20).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Prins (Nanang Nurdin,2012:21) Izin adalah keputusan administrasi negara berupa peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal yang kongkrit.

Pemerintah mengeluarkan izin untuk mengatur segala tindakan – tindakan yang terdapat dalam masyarakat, agar tidak bertentangan dengan ketentuan serta Perundang –Undangan yang berlaku.

2.5.2 Tujuan Perizinan

Bagi pemerintah, perizinan mempunyai tujuan untuk melaksanakan peraturan dan sedapat mungkin menjadikan sebagai peraturan yang sesuai dengan kenyataan dilapangan. Dan terhadap masyarakat, perizinan merupakan suatu bentuk dari suatu kepastian hukum yang jelas terhadap suatu yang sebelumnya dilarang dan akhirnya diperkenankan (Alfathia, 2001 : 15)

Sedangkan mengenai tujuan perizinan tersebut dapat ditinjau melalui dua sisi yaitu :

1. Dilihat dari sisi pemerintah sebagai pemberi izin, perizinan tersebut mempunyai tujuan untuk dapat melaksanakan peraturan, apakah ketentuan yang ada didalam peraturan perundang – undangan tersebut telah sesuai dengan kenyataan dilapangan. Dan perizinan yang diberikan oleh pemerintah secara tidak langsung memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri.
2. Jika dilihat dari sisi pemohon yang dalam hak ini yaitu masyarakat pada umumnya pemberian izin yang diberikan bertujuan untuk mengetahui adanya kepastian hukum mengenai perizinan tersebut. Dan untuk dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhindar dari hal-hal yang nantinya akan menimbulkan masalah kemudian hari dan terakhir perizinan merupakan fasilitas oleh masyarakat.

Menurut Ridwan (2002:217) fungsi perizinan adalah sebagai suatu instrument yuridis dari pemerintah, izin yang dianggap ujung tombak instrumen hukum berfungsi sebagai :

- a. Pengarah
- b. Perekayasa
- c. Perancang masyarakat adil dan makmur
- d. Pengendali
- e. Penertib masyarakat

2.6 Usaha Ritel

Menurut Syihabudin (2008:110) Bisnis Ritel merupakan suatu bisnis menjual barang dan jasa pelayanan yang telah bernilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau pengguna akhirnya. Bisnis ritel memberikan banyak kontribusi dalam menyerap tenaga kerja sehingga bisa mengurangi pengangguran.

Selain itu, menurut Christina (2010:5) Ritel juga merupakan salah satu perangkat dari aktivitas-aktivitas bisnis yang melakukan penambahan nilai terhadap produk-produk dan layanan kepada konsumen dalam penggunaan atau konsumsi perseorangan maupun keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manajemen ritel dipahami sebagai segala upaya yang dilakukan dalam mengelola bisnis ritel, dimana didalamnya juga termasuk pengelolaan yang terkait dengan keuangan, pemasaran, sumber daya dan operasional bisnis ritel.

2.7 Macam-macam Ritel

Berdasarkan jenis barang dagangan dan perbedaan barang yang dijual, ritel dapat dibedakan menjadi :

1. Supermarket konvensional

Melayani penjualan makanan, daging, serta produk-produk makanan lainnya, serta melakukan pembatasan penjualan terhadap produk-produk non makanan, seperti produk kesehatan, kecantikan dan produk-produk umum lainnya.

2. Big-box retailer

Pada format big-box retailer, terdapat beberapa jenis supermarket, yaitu supercenter, hypermart, dan warehouse club.

- a. Supercenter yaitu supermarket yang mempunyai luas lantai 150.000 hingga 22.000 meter persegi dengan memiliki variasi produk yang dijual.
- b. Hypermart juga merupakan supermarket yang memiliki luas antara 100.000 – 300.000 meter persegi. Hypermart adalah suatu konsep pertokoan yang sangat besar dan merupakan wujud baru dari supermarket, didalamnya tersedia berbagai kebutuhan yang lengkap. Contohnya Giant, Carrefour dan Hypermart.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Were house merupakan ritel yang menjual produk makanan yang macamnya terbatas dan produk-produk umum dengan layanan yang minim pada tingkat harga yang rendah terhadap konsumen akhir dan bisnis kecil.

3. Toko kebutuhan sehari-hari

Toko kebutuhan sehari-hari ditunjukan kepada konsumen yang membutuhkan pembelian dengan cepat tanpa harus mengeluarkan usaha yang cukup besar dalam mencari produk-produk yang dicari.

4. General merchandise retail

a. Toko Diskon

Merupakan jenis retail yang menjual sejumlah variasi, produk dengan menggunakan layanan yang terbatas dan harga yang murah.

b. Toko Khusus

Toko khusus berkonstrai pada sejumlah kategori produk-produk komplementer terbatas dan memiliki level layanan yang tinggi dengan luas toko sekitar 8.000 meter persegi.

c. Toko Kategori

Merupakan toko diskon yang memiliki variasi produk yang dijual lebih sempit atau khusus memiliki macam produk yang lebih banyak.

d. Departement Store

Merupakan jenis ritel yang menjual vaiasi produk yang luas dan berbagai macam produk dengan menggunakan beberapa staf, seperti layanan pelanggan dan sales counter.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

e. Swalayan

Melayani kebutuhan konsumen sehari-hari meliputi makanan dan minuman, juga kebutuhan yang berhubungan dengan pakaian dan keperluan rumah tangga lainnya.

2.8 Tata cara dan Persyaratan Perizinan

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam perizinan pasal 24 menyebutkan pelaku usaha melakukan kegiatan usaha di Bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki usaha sebagai legalitas.

Syarat- syarat mendirikan Toko Modern :

1. Fotocopy surat izin prinsip dari Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau Bupati/Walikota.
2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
3. Fotocopy surat izin lokasi dari instansi yang berwenang.
4. Fotocopy surat izin gangguan (HO)

Selain itu syarat dalam pendirian usaha ritel Pemerintah Kota Pekanbaru hanya mengikuti peraturan yang dibuat oleh Walikota Pekanbaru yaitu Prinsip Walikota dimana hal ini telah mengatur tentang ketentuan- ketentuan yang wajib diikuti oleh pelaku usaha ritel, sesuai dengan Persetujuan Prinsip Walikota Pekanbaru Nomor 555/BPTPM/663/2015. Adapun Ketentuan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Mematuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Mematuhi Peraturan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER12/2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
2. Mematuhi dan melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
3. Mematuhi dan Melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
4. Mematuhi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Mendirikan Bangunan.
5. Mematuhi dan Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah, dan Melaksanakan Program K3 Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Jumlah Gerai yang dibuka harus sesuai dengan Persetujuan Izin Prinsip yang telah diberikan sebelumnya, yaitu 100 (seratus) gerai dan jumlah gerai tambahan yang sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang diberikan, yaitu 50 (lima puluh) gerai kemudian menjadi 150 gerai, dan tidak dibenarkan melebihi dari jumlah tersebut.
7. Wajib mematuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

2.8.1 Persyaratan Pengurusan Surat Izin Gangguan (HO) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan pasal 4 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan .

1. Untuk memperoleh izin gangguan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis menurut formulir dan daftar isian.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Pas photo 3 x 4 (2 lembar)
 - b) Fotocopy KTP
 - c) Fotocopy Akta Perusahaan yang berbadan hukum
 - d) Surat Keterangan Racun Api
 - e) Surat Bukti Pemilikan Tanah/ Bangunan
 - f) Fotocopy IMB (Hotel, Bangunan Skala Besar)
 - g) Fiskal Daerah
 - h) Rekomendasi Dinas Terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Khusus untuk HO Hiburan Umum Harus ada Rekomendasi RT dan RW
 - j) Foto tempat usaha
3. Bagi usaha izin gangguan intensitas tinggi atau besar wajib memiliki dokumen lingkungan yaitu : Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau Usaha Kelola Lingkungan (UKL) atau Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam persyaratan tersebut diatas diatur dengan Peraturan Walikota (Perwako).
5. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Fotocopy Akte Pendirian dan atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; atau
7. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

2.8.2 Persyaratan Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Fotocopy Akta Pendirian dan atau perubahan (untuk SIUP Cabang : Akta Pusat + Cabang/ Penunjukan Pimpinan Cabang)
2. Asli dan fotocopy penerimaan perubahan (bila dalam proses perubahan)
3. Asli dan Fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum (PT /Koperasi)
4. Fotocopy Akta Pusat + Cabang/ Penunjukan Pimpinan Cabang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Fotocopy SIUP Pusat yang telah dilegalisir 3 rangkap (untuk SIUP dan TDP Cabang)
6. Fotocopy TDP Pusat yang telah dilegalisir 3 rangkap (untuk SIUP dan TDP Cabang)
7. Fotocopy Bukti pendaftaran pengadilan/ hal. Terakhir (CV,FA)
8. Fotocopy SITU/HO
9. Fotocopy NPWP Badan Usaha/NPWP Perorangan (SIUP Perorangan)
10. Fotocopy KTP
11. Pas photo 3 x 4 (3 lembar)
12. Fotocopy Izin Teknis (untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis)
13. Asli Surat kuasa (bila bukan yang bersangkutan)

2.8.3 Persyaratan Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Fotocopy Akta Pendirian dan atau perubahan (untuk SIUP Cabang : Akta Pusat + Cabang/ Penunjukan Pimpinan Cabang)
2. Asli dan fotocopy penerimaan perubahan (bila dalam proses perubahan)
3. Asli dan Fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum (PT /Koperasi)
4. Fotocopy Akta Pusat + Cabang/ Penunjukan Pimpinan Cabang
5. Fotocopy SIUP Pusat yang telah dilegalisir 3 rangkap (untuk SIUP dan TDP Cabang)
6. Fotocopy TDP Pusat yang telah dilegalisir 3 rangkap (untuk SIUP dan TDP Cabang)
7. Fotocopy Bukti pendaftaran pengadilan/ hal. Terakhir (CV,FA)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Fotocopy SITU/HO
9. Fotocopy NPWP Badan Usaha/NPWP Perorangan (SIUP Perorangan)
10. Fotocopy KTP
11. Pas photo 3 x 4 (3 lembar)
12. Fotocopy Izin Teknis (untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis)
13. Asli Surat kuasa (bila bukan yang bersangkutan)

2.8.4 Persyaratan Pengurusan Surat Rekomendasi atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

1. Surat permohonan
2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan Berbadan Hukum dan Perubahan Jika Ada.
3. Fotocopy NPWP Perusahaan atau Pribadi.
4. Fotocopy KTP Direktur atau Pemilik Perusahaan / Penanggung Jawab Perusahaan.
5. Izin Prinsip.
6. Hasil Analisa Ekonomi.
7. Fotocopy surat izin Undang-Undang Gangguan (HO).
8. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
9. Rencana Kemitraan.
10. Surat Sewa Menyewa.
11. Rekomendasi Lingkungan Setempat.
12. Rekomendasi Lurah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Rekomendasi Camat.

14. Pas Photo 3x4 Warna sebanyak tiga lembar

15. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang ada.

2.9 Pandangan Islam

Didalam Islam, Allah telah menggariskan konsep pengawasan yang diberikan oleh islam telah tercakup semua sisi kemanusiaan, baik mencakup semua orang mukmin, sejak ia baligh sampai matinya, dari perkataan, perbuatan sampai pada kata hatinya.

Hal ini telah dijelaskan oleh Allah secara umum dalam QS Al-Fajr (89 : 14), yaitu :

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

Selanjutnya Allah juga mengawasi makhluknya, dalam berbagai aktivitas yang telah dijelaskan dalam QS Al- Infitar (82 : 10), yaitu

وَأِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾

Artinya: Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (Malaikat-malaikat) yang Mengawasi (pekerjaanmu),

Pengawasan yang paling tepat adalah pengawasan yang dilakukan oleh diri sendiri, tetapi bukan dari atasan ataupun orang lain. Karena Al-Quran telah memberi petunjuk, bahwa setiap apa yang kita perbuat atau kita lakukan itu tidak terlepas dari pengawasan Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa pengawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang paling hakiki adalah pengawasan yang berasal dari Allah SWT, serta yang dilakukan oleh manusia terhadap diri dan lingkungannya tentunya memiliki keterbatasan.

2.10 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti, dimana peneliti mengambil penelitian sebelumnya yaitu:

1. Juwinta (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pemberian Izin Usaha Ritel di Kawasan Kecamatan Tampan”, menyimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan izin kepada usaha ritel di kawasan Kecamatan Tampan belum berjalan sesuai dengan harapan. Masih ditemukan pelanggaran yang menyebabkan pedagang tradisional di Kota Pekanbaru yang tersudutkan dan operasionalisasi usaha yang diberikan izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang belum terlaksana secara maksimal karena masih ada usaha yang belum memiliki izin operasional usaha.
2. Laksemama Lufti (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “ Dampak keberadaan indomaret terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang pasar tradisional di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa ada banyak dampak yang ditimbulkan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan gerai Indomaret disekitar pasar tradisional maupun disekitar pedagang grosir.

3. Yogi Muhammad Akbar (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengawasan Penyelenggaraan Waralaba oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BMPPTSP) Kabupaten Pandeglang” menyimpulkan bahwa pengawasan dalam penyelenggaraan waralaba minimarket Indomaret/Alfamart di Kabupaten Pandeglang belum berjalan optimal. Karena masih terdapat waralaba minimarket di Kabupaten Pandeglang yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara BMPPTSP dan Tim Pelaksana Teknis dan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang khususnya pada saat proses perizinan ditempuh.

2.11 Defenisi Konsep

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralsir kesalahpahaman dalam penelitian maka penulis merasa perlu untuk mengoperasikan konsep-konsep dari keseluruhan teori yang digunakan.

1. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
3. Pengawasan keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan izin untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau usaha.
5. Ritel merupakan suatu bisnis menjual barang dan jasa pelayanan yang telah bernilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau pengguna akhirnya. Ritel memberikan banyak kontribusi dalam menyerap tenaga kerja sehingga bisa mengurangi pengangguran.

2.12 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah istilah atau definisi yang menjadikan konsep yang masih bersifat abstrak menjadi operasional yang memudahkan pengukuran variabel sehingga menjadi faktor- faktor yang dapat diukur.

Tabel 2.1
Konsep Operasional

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	1. Pengawasan Penataan Toko Swalayan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan dapat dilakukan kerjasama dengan Instansi terkait, masyarakat dan / atau lembaga / organisasi kemasyarakatan b. Memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang ada diwilayah yang bersangkutan dengan membuat kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat c. Memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat d. Jam kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk hari senin dan jumat pukul 10.00 – 22.00 wib dan untuk hari sabtu dan minggu pukul 10.00 – 23.00 wib
	2. Pengawasan terhadap Operasional Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan terhadap barang atau produk b. Rencana kemitraan dengan UMKM c. Penyerapan Tenaga Kerja
	3. Sanksi administratif	<ul style="list-style-type: none"> a. Peringatan lisan dan/ atau tertulis b. Pembekuan Izin Usaha c. Pencabutan Izin Usaha
	4. Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan

Sumber : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.13 Kerangka Pemikiran

